



MATRIKS PERATURAN, KEPUTUSAN DAN KEBIJAKAN UNIT ORGANISASI

HIERARKI ATURAN UNDANG-UNDANG (UU)

Peraturan / Kebijakan	Undang-Undang (UU)
UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009	Perikanan: Dasar hukum utama untuk perlindungan sumber daya ikan, wewenang aparat pengawas, serta penindakan tindak pidana perikanan (IUU Fishing).
UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Mengatur pengawasan tata ruang pesisir, reklamasi, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil.
UU No. 32 Tahun 2014	Kelautan: Mengatur sistem keamanan, penegakan hukum di laut, dan perlindungan lingkungan laut secara lebih luas.
UU No. 6 Tahun 2023	Cipta Kerja (Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022): Memperbarui beberapa pasal terkait perizinan berusaha dan transisi penguatan sanksi administratif dalam sektor perikanan.

HIERARKI ATURAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) & PERPRES

Peraturan / Kebijakan	Undang-Undang (UU)
PP No. 27 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan: Aturan turunan UU Cipta Kerja yang merinci tata cara pengawasan, perizinan, dan penegakan tata ruang laut.
PP No. 05 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Menjadi acuan PSDKP dalam mengawasi kepatuhan pelaku usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatannya.
Perpres No. 38 Tahun 2023	Kementerian Kelautan dan Perikanan: Mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi kelembagaan Ditjen PSDKP secara nasional.





HIERARKI ATURAN PERATURAN MENTERI KKP (PERMEN KKP)

Peraturan / Kebijakan	Undang-Undang (UU)
Permen KP No. 47 Tahun 2020 jo Permen KP No. 4 Tahun 2025	Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan: Pedoman teknis tentang wewenang, kode etik, perlengkapan, dan ruang lingkup tugas Pengawas Perikanan di lapangan.
Permen KP No. 69/PERMEN-KP/2020	Organisasi dan Tata Kerja UPT PSDKP: Mengatur struktur hierarki dan wilayah kerja Pangkalan dan Stasiun PSDKP di seluruh Indonesia.
Permen KP No. 31 Tahun 2021 jo Permen KP No. 26 Tahun 2022	Pengenaan Sanksi Administratif: Mengatur instrumen denda, pembekuan izin, dan sanksi non-pidana bagi pelanggar aturan perikanan dan kelautan.
Permen KP No. 23 Tahun 2021	Sistem Pemantauan Kapal Perikanan: Menjadi dasar hukum PSDKP dalam memantau pergerakan kapal via Vessel Monitoring System (VMS) dan pengecekan Surat Laik Operasi (SLO).

HIERARKI ATURAN PERDIRJEN & KEBIJAKAN TEKNIS PSDKP

Peraturan / Kebijakan	Undang-Undang (UU)
Perdirjen PSDKP No. 4/PER-DJPSPDKP/2020	Operasi Pengawasan SDKP: Petunjuk teknis taktis mengenai operasi pengawasan udara (Air Surveillance) dan patroli armada kapal pengawas.
Perdirjen PSDKP No. 5/PER-DJPSPDKP/2020	Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak: Juknis untuk menanggulangi destructive fishing seperti penggunaan bom ikan dan racun, khususnya untuk kapal di bawah 30 GT.
Kepdirjen PSDKP No. 55 Tahun 2024	Penyaluran Bantuan Pokmaswas: Regulasi teknis mengenai apresiasi dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di tingkat daerah.
Surat Edaran Dirjen PSDKP No. B.188/2026	Pengawasan Penanganan Sampah Plastik: Kebijakan terbaru terkait kewajiban kapal perikanan dalam menekan pencemaran sampah di laut.

